

## ABSTRAK

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi tidak ditemukan pengertian tentang korupsi. Akan tetapi, dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan masalah antara lain ; a. Pengaturan Undang-undang terkait penyalahgunaan pupuk bersubsidi; b. Penerapan pasal Undang-undang Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sehingga diperoleh kesimpulan; Dalam upaya untuk menjamin pengadaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi perlu ditetapkan Keputusan Menteri, yaitu melalui Surat Keputusan Menperindag Nomor 70 / MPP / Kep / 2 / 2003 tanggal 11 Pebruari 2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Setelah menganalisa kasus di atas sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 36/Pidsus/2011/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 131/PID.SUS/2011/PT.SBY pelanggaran terhadap pupuk bersubsidi dikenakan Undang-undang yang sudah diatur di Indonesia antara lain : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Subsidiair sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

**Kata Kunci; (Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi Kerugian Keuangan Negara)**

## ***ABSTRACT***

In the provisions of Law No.. 31 of 1999 and Act No.. 20 Year 2001 on Combating Corruption can't find the notion of corruption. However, taking into account the category of corruption as a formal offense, Article 2 and Article 3 of Law No. shrimp. 31 of 1999 set firmly on the elements of the crime of corruption is. Article 2 of Law No. shrimp. 31 of 1999, of the background is obtained formulation of the problem, among others: a. Setting Law related misuse of subsidized fertilizer, b. Implementation Act section of Corruption misuse of subsidized fertilizer. In this thesis research use the approach of legislation and conceptual approaches that conclusion; In an effort to ensure the procurement and prevent irregularities in the distribution of subsidized fertilizer necessary to establish Minister, through the Minister of Industry Decree No. 70 / MPP / Kep / 2/2003 dated 11 February 2003, on the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizer farm Sector, after that analyze these cases in accordance with the Decision of the Corruption Court in Surabaya District Court No. 36/Pidsus/2011/PN.SBY and Corruption Court Decision in High Court Surabaya Number: 131/PID.SUS/2011/PT.SBY violation of subsidized fertilizer imposed laws that have been set up in Indonesia, among others: Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law. 31 of 1999 and Law no. 20 Year 2001 on Eradication of Corruption in the primary charges and Article 3 in conjunction with Article 18 of Law. 31 of 1999 and Law no. 20 of 2001 in that subsidiary charges dropped criminal charges against the defendant.

**Keywords: (Corruption, Abuse Of Subsidized Fertilizer Loss Of State Finance)**